

Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

jsb jurnal
sejarah dan budaya

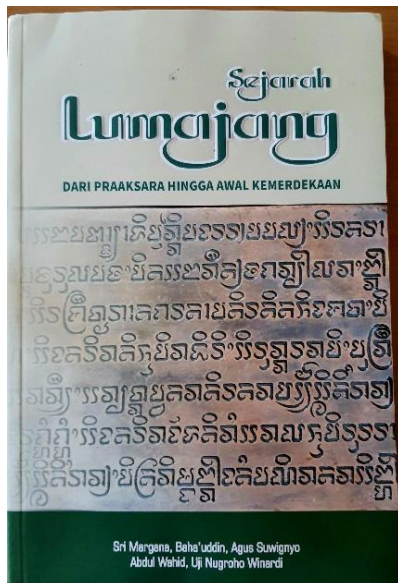
Book Review

Journal homepage: <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>

Lumajang: Dari Praaksara Hingga Awal Kemerdekaan (Ulasan Buku)

Aldilla Dinda Yuniarta
yuniarta862@gmail.com

Alumni Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Kec Sumpersari, Kab Jember, Provinsi Jawa Timur, 68121, Indonesia.



Judul buku:

Lumajang: Dari Praaksara Hingga Awal Kemerdekaan

Penulis:

Sri Margana, Baha'uddin, Agus Suwignyo, Abdul Wahid, Uji Nugroho Winardi

Penerbit:

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (2022)

Halaman:

xii + 463 hlm

ISBN:

978-623-363-298-0

Harga Buku:

IDR. 100.000 (Soft Cover)

Lumajang tergolong ke dalam wilayah penting yang eksis sejak masa praaksara. Sayangnya minim sekali sumber-sumber sejarah Lumajang yang dapat ditemukan, sehingga fakta-fakta sejarah yang selama ini beredar di masyarakat tidak dapat dipastikan kevalidannya. Minimnya sumber sejarah mengenai wilayah Lumajang ternyata cukup menjadi permasalahan terutama bagi para peneliti. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, serta meluruskan fakta sejarah mengenai Lumajang, pihak Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Sri Margana, dkk untuk menuliskan buku tentang sejarah Lumajang yang berjudul "*Lumajang: Dari Praaksara Hingga Awal Kemerdekaan*" secara mendetail yang disertai dengan sumber-sumber valid. Buku ini mendeskripsikan secara rinci mengenai wilayah Kabupaten Lumajang sejak abad ke-13 hingga masa awal kemerdekaan. Adapun isu-isu permasalahan yang diangkat dalam buku ini cukup kompleks, yakni meliputi masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya wilayah Lumajang dari masa Praaksara hingga awal Kemerdekaan.

Upaya pengkajian Sejarah Lumajang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 1995 oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Sosial Budaya Panji Warama, namun sangat disayangkan ternyata penelitian yang dilakukan oleh Panji Warama ini masih memiliki



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

banyak kekurangan data, ada beberapa kesalahan informasi sejarah, beberapa lembar tulisan ada yang hilang dan buku ini tidak pernah diterbitkan secara resmi. Adapun kajian yang terdapat dalam buku Sejarah Lumajang yang ditulis oleh Panji Warama diantaranya mencakup aspek politik, ekonomi dan sosial budaya sejak masa Hindu hingga masa Orde Baru. Dari buku tersebut dapat disimpulkan bahwa Lumajang telah memainkan berbagai peran penting di masa lalu, khususnya sejak masa Hindu Buddha hingga Orde Baru.

Jika penulisan sejarah Lumajang sudah pernah dilakukan, lalu apa perbedaan buku yang telah ditulis oleh Panji Warama dengan buku yang ditulis oleh Sri Margana, dkk ini? Di dalam buku "*Lumajang: Dari Praaksara Hingga Awal Kemerdekaan*" ini isu politik, ekonomi, dan sosial-budaya juga dikaji seperti topik dalam penelitian Panji Warama, namun dikemas dengan pembahasan yang lebih kompleks dan mendetail. Beberapa pembahasan di buku ini (yang pertama), tidak terdapat di dalam penelitian Panji Warama. Penggunaan bahasanya lebih mudah dipahami karena dilengkapi dengan *footnote* atau *innote* pengertian dari kata asing. Sumber-sumber penulisan maupun arsip yang digunakan tertulis dengan jelas menggunakan footnote dan referensi di setiap bab. Berbagai sumbernya merupakan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Selain itu, pelaksanaan penulisan buku ini juga melalui beberapa tahap diskusi yang menghadirkan kalangan pegiat sejarah dan sejarawan Lumajang, dengan harapan agar dapat mengoreksi hal-hal yang kurang tepat sebelum diterbitkan dan beredar di masyarakat luas.

Untuk memudahkan pembaca, secara sistematis penulis membagi kajian buku *Lumajang: Dari Praaksara Hingga Awal Kemerdekaan* ke dalam sembilan bab yang menguraikan informasi tentang masing-masing topik secara lengkap dan terperinci. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini dibagi kedalam tiga kategori: *pertama*, sumber masa klasik yang berupa prasasti, naskah kuno (kakawin dan babad), serta folklore (hlm 8); *kedua*, sumber kolonial yang berupa laporan VOC dan sumber-sumber pemerintah kolonial periode Hindia Belanda dan Inggris; *ketiga*, sumber pasca kemerdekaan selama periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Berbagai sumber tersebut terdiri dari arsip atau dokumen berupa laporan surat-menyurat, pamflet, foto, ilustrasi, berita koran, majalah dan juga naskah-naskah tradisional (hlm 8).

Kesimpangsiuran interpretasi tentang sejarah dan tokoh-tokoh pada masa Hindu Buddha di Lumajang cukup membuat perdebatan panjang antar sejarawan di daerah tersebut. Ada beberapa sejarawan yang menulis mengenai kehidupan wilayah Lumajang pada masa Hindu Buddha, namun setelah dibaca lebih lanjut ternyata buku mereka kurang kuat dalam memberikan informasi yang valid, karena keterbatasan sumber-sumber penulisannya. Ada pula penulis yang asal memberi asumsi belaka tanpa adanya bukti sumber yang kuat, padahal buku sejarah harus lahir dari sumber-sumber valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan hanya berasal dari asumsi belaka. Dengan demikian, buku tulisan Sri Margana, dkk ini hadir dengan harapan agar dapat meluruskan informasi-informasi sejarah yang kurang tepat yang telah beredar di masyarakat selama ini. Beberapa bab dalam buku ini membahas tentang awal munculnya peradaban di Lumajang sebagai sebuah entitas sosial, budaya, dan politik dari masa praaksara, Hindu Buddha, hingga terjadinya proses Islamisasi. Buku ini memaparkan jika berdasarkan informasi yang tertulis pada Prasasti Mula Malurung (ditemukan di Kediri pada tahun 1975) maka Lumajang sudah

menjadi wilayah administratif politik setidaknya sejak tahun 1255 Masehi (hal 1). Namun jauh sebelum itu, wilayah Lumajang sudah dihuni oleh komunitas manusia sejak periode praaksara terutama pada masa Megalithikum. Informasi kesejarahan Lumajang pada masa Megalithikum dapat terdeteksi dari ditemukannya data-data arkeologis. Tepatnya di Situs Selogending terdapat menhir, meja batu, dolmen, dan punden berundak yang diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktek kebudayaan manusia Lumajang pada masa Megalithikum (hlm 21).

Temuan lain yang memperkuat bukti eksisnya Lumajang sejak masa Megalithikum ialah dengan ditemukannya berbagai bentuk beliung persegi sederhana yang ditemukan di daerah Kecamatan Senduro, Klakah, dan Sukodono (hlm 22). Sebuah patung logam khas peninggalan periode perunggu juga ditemukan di Lumajang, tepatnya di daerah Pasirian. Semua temuan benda tersebut diperkuat dengan ditemukannya benda-benda artefaktual di wilayah Ranu Klakah yang kemudian diyakini menjadi salah satu wilayah permukiman manusia pada masa Megalithikum (hlm 25).

Eksistensi wilayah Lumajang terus berlanjut dan menguat pada periode Hindu Buddha. Hal ini dibuktikan dengan disebutnya wilayah Lumajang dalam Prasasti Ranu Kumolo, Tesirejo, dan Pasrujambe (diperkirakan pada masa Kerajaan Kediri). Didalamnya tertulis bahwa wilayah Lumajang merupakan wilayah penting yang digunakan sebagai tempat peribadatan keagamaan (hlm 25-32). Kemudian setelah dikeluarkannya Prasasti Mula Malurung kemudian wilayah Lumajang tercatat sebagai sebuah wilayah administrasi kekuasaan politik yang dipimpin oleh Nararya Kirana. Pada salah satu bagian prasasti itu disebutkan bahwa pada tahun 1177 Saka (1255 M) Nararya Kirana dinobatkan sebagai Juru Lamajang oleh ayahnya Nararya Sminingrat, Raja Singasari (hlm 32). Pada 1268 M, Raja Sminingrat atau Wisnuwardhana meninggal dunia, tahta Kerajaan Singasari kemudian dijabat oleh Kertanegara pada 1268 M (hlm 41). Sebagaimana diceritakan dalam Kitab Pararaton, pada masa awal pemerintahannya, Kertanegara melakukan perombakan struktur pemerintahan dan kebijakan politik dengan melakukan mutasi terhadap beberapa petinggi kerajaan dengan dalih karena para pejabat tersebut kurang disenanginya (hlm 41).

Penguasa penting yang memimpin Lumajang setelah Nararya Kirana yakni Arya Wiraraja. Mulanya Arya Wiraraja berkedudukan sebagai Rakryan Demung (jabatan karir di atas Tumenggung) masa pemerintahan Raja Kertanegara di Singasari (hlm 41). Arya Wiraraja merupakan tokoh penting yang ada dibalik pergantian kekuasaan dari Kerajaan Singasari ke Kerajaan Kediri, dan dari Kerajaan Kediri ke Kerajaan Majapahit. Karena jasanya dalam membantu Raden Wijaya mengambil alih kekuasaan dari tangan Jayakatwang (Kerajaan Kediri) dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Sesuai dengan perjanjian Sungeneb, Arya Wiraraja mendapatkan separuh wilayah Kerajaan Majapahit yang kemudian dikenal dengan Lamajang Tigang Juru (hlm 57).

Kerajaan Lamajang Tigang Juru kemudian baru mulai diproklamasikan pasca terjadinya Pemberontakan Ranggalawe tahun 1295 M (hlm 57). Kepemimpinan Arya Wiraraja berakhir ketika dua meninggal dunia pada tahun 1310 M dan kepemimpinan di kerajaan ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Pu Nambi pada 1311 M. Namun karena fitnah yang dilakukan oleh Mahapatih, kekuasaan Pu Nambi di Lamajang jadi terancam diserang oleh Jayanegara (Raja Majapahit kedua pengganti Raden Wijaya). Perang Lamajang

pada akhirnya tidak dapat dihindari dan terjadi pada tahun 1316 M. Berdasarkan dari Prasasti Lamongan atau Jayanegara I, wilayah Lamajang Tigang Juru akhirnya disatukan lagi dengan wilayah Kerajaan Majapahit. Dengan demikian Kerajaan Lamajang Tigang Juru hanya berumur sekitar 21 tahun (1295-1316 M) (hlm 81-82).

Berdasarkan bukti Sejarah yang ditemukan yakni berupa candi peribadatan yang ada di kawasan Ibukota Kutorenon (Situs Biting), maka dapat dipastikan bahwa Arya Wiraraja adalah seorang penganut Hindu (hlm 105). Sedangkan Pu Nambi, berdasarkan dari Candi Randuagung yang didirikannya di Randuagung maka dipastikan bahwa ia merupakan penganut Hindu beraliran Siwa (hlm 105). Dari bukti arkeologis dan historis yang telah ditemukan ini maka Sri Margana, dkk menyimpulkan bahwa Lamajang Tigang Juru merupakan kerajaan yang bercorak Hindu (hlm 106). Dengan demikian buku ini dapat menjawab dan membuktikan bahwa asumsi Agus Sunyoto dari buku yang berjudul *Atlas Wali Songo* terbitan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemerintahan Arya Wiraraja bercorak Islam itu salah. Terlebih lagi tidak ada bukti valid dari asumsi Agus Sunyoto tersebut.

Buku ini juga memaparkan dengan rinci mengenai perkembangan sejarah Lumajang di masa transisi menjelang kejatuhan Kerajaan Majapahit hingga munculnya dominasi baru kerajaan bercorak Islam dari Jawa Tengah yang mencoba memperebutkan hegemoni Lumajang. Pada akhir abad ke-15 di Lumajang telah ditemukan komunitas muslim yang ditandai dengan ditemukannya makam Adipati Terung di kompleks Situs Biting atau Kutorenon. Adipati Terung meninggal saat sedang melakukan pelarian karena kasus politik yang kemudian diberi perlindungan oleh penguasa Lumajang saat itu (penguasa – penguasa Lumajang pada periode abad ke-16 dan 17 masih memeluk agama Hindu). Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Adipati Terung tidak memiliki pengaruh dalam melakukan Islamisasi di wilayah Lumajang.

Bukti – bukti mengenai masuknya agama Islam sebagai agama negara baru terjadi pada awal akhir abad ke-17. Islamisasi yang masif di Lumajang baru terjadi pada masa Mataram, khususnya pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat II (1677 – 1703 M) (hlm 144). Tepatnya yakni ketika wilayah Lumajang kemudian secara perlahan dianeksasi oleh Surapati yang kemudian menempatkan para keturunan mereka sebagai bupati-bupati Islam pertama di wilayah Malang, Antang, dan Lumajang (Kartanegara, cucu Surapati adalah Bupati Lumajang Pertama yang memeluk Islam) (hlm 148). Di Lumajang Raja Blambangan juga belajar ajaran agama Islam kepada Bupati Kartanegara dan akhirnya memeluk Islam. Perlawanan Lumajang terhadap VOC turut dipaparkan dalam buku ini yang dikemas pada bab khusus dalam kurun waktu 1767-1768 M. Pada abad ke-18 masyarakat Lumajang juga turut melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada saat itu telah terjadi perubahan politik di Jawa Tengah yang sangat berpengaruh terhadap keadaan politik di Ujung Timur Jawa termasuk Lumajang. Hingga tahun 1768 M Lumajang tetap menjadi wilayah kekuasaan Surapati dan para keturunannya. Pada masa Surapati dan para keturunannya inilah Islam berkembang secara pesat. Bahkan Islam menjadi basis perlawanan terhadap VOC dengan karakteristik Ideologi Islam yang kuat. Surapati memang sudah lama menjadi musuh utama VOC. Setelah ia terbunuh tahun 1704 M, beberapa keturunannya masih berpengaruh di Malang, Antang, dan Lumajang.

Kartanagara selaku Bupati Lumajang mencoba melawan namun terdesak hingga mengungsi ke Malang dan kemudian terbunuh setelah Malang ditaklukkan oleh VOC. Setelah Lumajang jatuh pada tahun 1768 M, praktis wilayah ini telah menjadi wilayah kekuasaan VOC dan ditunjuk penguasa-penguasa yang tidak reaktif terhadap VOC dan di luar jalur keturunan Surapati. Setelah Bupati Kartanegara gugur melawan tentara VOC, Lumajang berkedudukan sebagai unit administratif yang digabung dengan Kabupaten Probolinggo di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Jayanegoro (1768–1805 M) (hlm 289). Dengan penggabungan itu, status Lumajang menjadi tidak lebih dari sebuah distrik atau *kapanewon* (kecamatan) di bawah kepemimpinan seorang wedana (hlm 289).

Memasuki abad ke-19 wilayah Lumajang sudah menjadi sebuah *afdeeling* (wilayah administratif setara dengan kabupaten). Seiring berkembangnya waktu nantinya Lumajang berkembang menjadi *zelfstandig afdeeling* (*afdeeling* Mandiri) dan peringkatnya terus naik hingga menjadi *regentschap* yang berjalan hingga masa Kemerdekaan. Pada pergantian abad ke-19 di seluruh Jawa terjadi perubahan politik yang juga mempengaruhi Lumajang. Setelah VOC jatuh, Belanda membentuk negara kolonial Hindia Belanda yang wilayahnya terdiri dari wilayah-wilayah yang telah berada di wilayah kekuasaan VOC sebelumnya (hlm 4). Pada masa pemerintahan Daendels, sebagian wilayah Lumajang sekaligus dengan wilayah Probolinggo dan Besuki dijual kepada pengusaha peranakan Tionghoa, Han Kik Ko. Namun wilayah-wilayah yang dijual kepada Han Kik Ko itu kemudian dibeli lagi oleh pemerintah setelah terjadinya peristiwa “Kepruk Cina” atau pemberontakan Demang Muneng pada tahun 1813 masa kekuasaan Inggris (hlm 207-208).

Terdapat beberapa pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh buku ini mengenai keadaan ekonomi, sosial, dan budaya Lumajang terlebih lagi perihal isu pendidikan, kesehatan, dll pada masa kolonial. Jawaban yang dipaparkan oleh Sri Margana, dkk menunjukkan bahwa walaupun sektor ekonomi kolonial berupa perkebunan tebu, tembakau, dan kopi telah membuka pintu investasi agroindustri Barat dan eksplorasi kapitalisme modern di wilayah ini, namun sektor pertanian pangan yang merupakan sumber penghidupan tradisional mayoritas penduduk Bumiputra tetap berkembang dengan baik dan tidak tergojahkan (hlm 240). Kehadiran perkebunan yang mayoritas dimiliki oleh pengusaha Eropa di satu sisi memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada sejumlah besar penduduk Bumiputra yang bekerja sebagai buruh di dalamnya. Sedangkan dalam bidang pendidikan selama periode kolonial wilayah Lumajang tidak ketinggalan dari wilayah lainnya di Jawa, yang mana sekolah-sekolah telah didirikan di Lumajang sejak pelaksanaan Politik Etis. Pendirian sekolah di Lumajang bertujuan untuk memenuhi dua kepentingan, yakni untuk memenuhi kebutuhan tenaga administratif di pemerintahan, swasta dan Perkebunan, serta berpengaruh dalam munculnya organisasi pergerakan nasional (hlm 271-273). Perihal isu kesehatan dan kebencanaan, buku ini memaparkan bahwa pada masa kolonial wilayah Lumajang kerap dilanda wabah penyakit malaria dan kolera. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan dan perubahan lingkungan yang terjadi sejak dibukanya banyak perkebunan (hlm 6). Sedangkan perihal isu kebencanaan, Lumajang seringkali dilanda banjir, tanah longsor, dan erupsi Gunung Semeru yang berdampak negatif pada aspek perekonomian (hlm 7).

Selain memaparkan situasi dan kondisi perkebunan dan pertanian Lumajang pada masa kolonial, buku ini juga memaparkan mengenai infrastruktur transportasi, salah satunya ialah kereta api. Buku ini memaparkan bahwasanya setidaknya ada dua jalur kereta api yang berhasil dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melayani transportasi hasil produksi perkebunan gula dan tembakau di Lumajang. Pertama jalur kereta api Surabaya-Pasuruan-Probolinggo milik *Staatspoorwegen* (SS) dan yang kedua ialah jalur Trem Probolinggo-Kraksaan-Paiton yang dibangun oleh *Probolinggo Stoomtram Maatschappij* (PbSM) (hlm 239). Jika membahas mengenai angkutan barang dan penumpang di wilayah Lumajang maka akan lebih baik jika buku ini juga dapat memaparkan keadaan perkeretaapian di pusat perkotaan Lumajang pada saat itu. Apa saja angkutan dan barang-barang yang banyak di bawa pada masa itu? apakah angkutan penumpang juga ramai di kawasan Lumajang atau hanya angkutan barang saja yang ramai? dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sekiranya dapat digunakan untuk melengkapi bab infrastruktur transportasi di Lumajang pada masa Kolonial.

Namun sayangnya buku ini belum menjelaskan secara gamblang mengenai perkeretaapian di wilayah perkotaan Lumajang. Padahal hal tersebut merupakan isu penting karena Kereta Api digunakan sebagai alat transportasi aktif di Lumajang pada masa kolonial dan kemudian perlahan menurun sejak adanya 'kendaraan ban karet'. Harapannya jika kedepannya akan diadakan penyuntingan buku untuk edisi revisi maka tim penulis buku dapat menambah pemaparan mengenai perkeretaapian. Penulis dapat menambah wawasan literasi mengenai perkeretaapian wilayah Lumajang yang telah ditulis oleh Aldilla Dinda Yuniarta (2024) berupa jurnal yang berjudul *Jalur Kereta Api dan Perkembangan Kota Lumajang Pada Masa Kolonial Hindia Belanda, 1893-1942* dan skripsi yang berjudul *Jalur Kereta Api Klakah-Pasirian Pada Masa Kolonial Hindia Belanda Tahun 1893 - 1942*.

Buku ini juga menguraikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lumajang pada awal abad ke-20 secara rinci. Lumajang di awal abad ke-20 (kira-kira tahun 1900 - 1940) dapat digambarkan sebagai wilayah yang sedang mengalami transformasi dari masyarakat berbasis ekonomi pertanian ke berbasis ekonomi perkebunan (hlm 245). Transformasi antara lain dipicu oleh peralihan model ekonomi non-formal ke ekonomi formal, yang mengubah struktur sosial masyarakat. Lumajang bertransformasi meninggalkan alam pertanian yang luas menuju alam industri olahan komoditas perkebunan. Buku ini turut memaparkan bahwa kesejahteraan masyarakat pada awal abad ke-20 ditentukan oleh banyak faktor. Berbagai faktor kondisi lingkungan dan minimnya infrastruktur ternyata dapat menjadi variabel tak terpisahkan dari potret ketidaksejahteraan Lumajang (hlm 286). Buruknya aliran sungai dan sistem drainase sehingga terjadi banjir setiap tahun, serta kebakaran setiap musim kemarau juga menambah potet ketidaksejahteraan di Lumajang. Buku ini juga telah menyajikan sketsa berbagai persoalan sosial penduduk Lumajang dan berbagai upaya pemerintah untuk mengatasinya. Wajah Lumajang di awal abad ke-20 diwarnai secara jelas oleh sketsa persoalan-persoalan itu.

Status Lumajang sebagai *zelfstandig afdeeling* merupakan embrio baru terbentuknya Kabupaten Lumajang pada tahun 1929. Selama periode *zelfstandig afdeeling* Lumajang dipimpin oleh dua orang Patih sebagai pemimpin tertinggi. Patih pertama adalah Raden Mas Singowiguno (1890-1920). Patih kedua adalah R.A.A. Kartodiredjo, yang kemudian menjadi

bupati pertama (1928-1940) (hlm 289). Peringkat prestasi administratif Lumajang terus naik hingga pada periode berikutnya hingga tahun 1928 statusnya ditingkatkan menjadi *Regenstschap* yang dipimpin oleh seorang bupati hingga masa Kemerdekaan (hlm 4). Buku ini menguraikan kedua sosok penting dari lahirnya kembali Kabupaten Lumajang dengan kapasitas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimilikinya masing-masing. Singowiguno dan Kartodiredjo telah berkontribusi sangat penting dalam kelahiran administrasi Lumajang yang baru dalam konteks birokrasi.

Pergerakan masyarakat Lumajang pada masa awal kemerdekaan juga turut dipaparkan dalam buku ini, bahwasanya pada masa Pergerakan Nasional para penduduk Lumajang menjadi pengikut fanatik dari Sarekat Islam, sebuah organisasi massa terbesar di Jawa pada paruh pertama abad ke-20. Pada masa Pendudukan Jepang, penduduk Lumajang juga aktif mengikuti berbagai Gerakan PETA yang kelak menjadi embrio bagi munculnya laskar-laskar dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada periode Revolusi Kemerdekaan, pemimpin-pemimpin lokal Lumajang juga turut tampil dalam kancah perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Secara umum buku ini memaparkan transformasi dan keadaan Lumajang hingga awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai sejarah Lumajang. Buku ini juga berhasil meluruskan fakta-fakta sejarah dengan menggunakan berbagai macam sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya. Buku ini cocok digunakan untuk akademisi, penggemar sejarah lokal, atau pembaca umum yang tertarik pada topik kesejarahan. Buku ini menarik untuk dijadikan bahan bacaan dalam penelitian-penelitian selanjutnya karena isu permasalahan yang dipaparkan dalam buku ini cukup kompleks, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menggali nilai-nilai politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Lumajang. Kekurangan dari buku ini ialah cukup banyaknya kesalahan penulisan kata atau nama tokoh yang kadangkala menyebabkan pembaca kebingungan, misalnya seperti yang terdapat pada halaman 39, terdapat salah penulisan nama tokoh '*Nararya Kirana*' menjadi '*Nararya Kinara*' sebanyak dua kali. Akhirnya, semoga ada edisi revisi pada cetakan berikutnya. Selamat membaca.